



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2022**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
ALAMAT: JL. JEND.SOEPRATO No. 23 TEMANGGUNG-56213**

Assalammualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua

Yang terhormat:

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung
3. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, Insan Pers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan pula kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini. Dan tidak lupa FPPP mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan selamat menjalankan Ibadah Puasa semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin

Rapat Dewan yang Terhormat.

Didalam melihat LKPJ Bupati Temanggung 2022 kita merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat atau menuju tinggal landas pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Mencermati apa yang disampaikan saudara Bupati sesaat tadi tentang pengantar LKPJ, FPPP melihat beberapa indikator makro daerah pada posisi yang cukup menggembirakan. Dan secara umum capaian kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan baik. Capaian kinerja Pemerintahan sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

FPPP menyadari bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah secara umum pada tahun 2022 adalah adanya rasionalisasi anggaran dan adanya Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan FPPP sangat apresiatif terhadap kinerja Pemerintah daerah atas kemampuan mengatasinya. Disamping itu FPPP juga memberikan apresiasi kepada Bupati atas beberapa prestasi yang telah diraihnya dengan mendapatkan beberapa penghargaan di beberapa bidang, sehingga mengharumkan nama Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat

Dalam tahun 2022 FPPP melihat beberapa program unggulan sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah daerah tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan Temanggung yang marem dan gendem perlu percepatan dan pembenahan juga perbaikan. Program-program unggulan daerah seperti di bidang Kesehatan, pertanian, peternakan, industri kecil, pariwisata dan sebagainya sudah mulai menunjukkan perkembangan untuk mencapai target yang ditentukan. Meskipun masih dibutuhkan beberapa dorongan untuk bisa bergerak lebih cepat. Pemerintah daerah masih tetap harus berperan aktif dalam pengembangan UMKM, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata di daerah. Pemberdayaan dan bimbingan kepada masyarakat pelaku UMKM,

Pariwisata dan juga Pertanian harus selalu ditingkatkan. Komunikasi tiga arah antara Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk mengetahui problematika yang sesungguhnya terjadi, sehingga bisa mencari formula penyelesaian yang tepat.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

Beberapa masukan yang kami sampaikan dalam pembahasan LKPJ saat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Perda RTRW belum sepenuhnya secara komprehensif dipahami. Ditambah lagi perubahan Perda RTRW sampai saat ini belum sesuai dengan harapan kita, antara harapan dengan kenyataan tidak sesuai. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebijakan masyarakat, dan investor sering memanfaatkan hal ini sehingga cenderung terjadi pelanggaran., untuk itu sosialisasi agar dilakukan secara berkala.
- Penetapan kawasan peruntukan industri perlu pembinaan. Infrastruktur jalan sebagai akses kelokasi yang tidak di pinggir jalan dibuatkan agar semua lokasi bisa dimanfaatkan. Saat ini para pengusaha sudah membangun pabrik-pabrik dipinggir jalan lokasi yang ada didalam tidak bisa dimanfaatkan.

2. Urusan Koperasi dan UMKM.

- Suport untuk pengembangan UMKM belum melalui perencanaan yang memadai dan tertata dengan baik. Saat ini UMKM yang ada cenderung berjalan ditempat atau bahkan mengalami kemunduran. Bisa dilihat UMKM Centre belum berjalan dengan baik.
- FPPP juga berharap dinas terkait memberi kemudahan dan bantuan dalam pemberian perijinan usaha agar produk UMKM dapat bersaing di pasar modern, selain itu penyuluhan juga

perlu dilakukan kepada para pelaku usaha mikro bagaimana pengemasan dan pemasaran produk mereka agar memiliki daya saing.

3. Urusan Sosial.

Bantuan dengan berbagai macam kriteria yang data berasal dari dinas sosial mestinya ada upgrade data. Karena dalam beberapa tahun ini pasti terjadi perubahan. Disamping itu perlu adanya monitoring bagi penerima bantuan (PKH). Monitoring diharapkan bisa meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu, juga menetralsir karena ada indikasi penerima PKH di daerah tertentu dijadikan sarana untuk kampanye.

4. Urusan Pertanian.

- Masalah keberhasilan bidang pertanian tidak bisa hanya dilihat dengan target dan capaian kinerja di perangkat daerah terkait. Namun harus secara riil di lapangan dan terjun langsung di masyarakat. Sehingga antara data dengan fakta bisa berbanding lurus. Dan angka-angka statistik yang tertuang dalam data mencerminkan kondisi riil tentang tingkat keberhasilan sektor pertanian dengan indikator petani makin sejahtera. Maka dalam hal ini FPPP berharap agar Pemkab bisa benar benar memberikan data yang akurat.
- Hasil Produksi Pertanian secara umum ternyata belum bisa mensejahterakan petani, nilai tukar ekonomi petani masih sangat rendah bila dibanding dengan pekerjaan disektor-sektor lain, misalnya buruh pabrik. Sektor Pertanian hanya mengejar produktivitas , tetapi tidak memperhatikan ekosistem yang ada sehingga factor kelestarian lingkungan sering diabaikan, hal ini bisa dilihat dari kondisi ekosistem dikawasan lereng gunung sindoro, Sumbing dan perahu, yang sudah mendekati titik mengawatirkan, terutama tingkat erosi tanah berapa kubik tanah yang hilang tiap kali hujan turun, disamping itu tingkat keasaman tanah (Ph) rata-rata sudah mencapai 7,0 padahal

kesuburan tanah akan normal kalau tingkat keasamannya diantara 3-4.

- RPJMD 2018-2023 dalam salah satu visinya adalah mewujudkan Peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan, sasaran yang dituju tidak berbanding lurus dengan petani, apakah pertanian modern itu hanya sebatas dari manual ke mesin atau bagaimana, ini yang perlu diperjelas, dan dalam visi dan misi ini FPPP melihat bahwa sektor ini masih dalam kondisi yang belum maksimal karena selama ini nilai tukar pertanian kabupaten Temanggung sangat rendah, artinya pola manual digeser ke pola modern tetapi NTP tetap rendah, disamping itu kalau kita melihat pertanian berwawasan lingkungan ternyata hanya sebatas teoritis belaka, FPPP melihat dalam hal ini pertanian kita justru semakin jauh dari wawasan lingkungan, karena mayoritas petani tidak diarahkan untuk menggunakan pupuk organik tetapi pemerintah sendiri malah menganjurkan menggunakan pupuk kimia, seharusnya ada aturan khusus yang mulai diarahkan untuk para petani sadar akan lingkungan hidup.
- Dalam sektor Pertanian terutama dalam hal pemanfaatan bantuan yang berasal dari DHBCT, FPPP berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Yang terjadi selama ini seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Harapannya pengelolaan bisa tepat sasaran dan tidak menguntungkan kelompok tertentu.

5. Lingkungan Hidup.

- Semakin meluasnya lahan kritis di Kabupaten Temanggung belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, baik mencakup program maupun dukungan pendanaan yang

memadai. Padahal kita tahu lahan di kawasan gunung Sumbing, Sindoro dan Prau sudah berada pada titik yang sangat kritis untuk itu Pemerintah daerah harus serius dengan mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program penanganan lahan-lahan kritis tersebut.

- Dampak pembangunan yang tidak terintegrasi dengan lingkungan hidup menimbulkan banjir besar di Kota Temanggung juga daerah lainnya bahkan sampai merusak sarana infrastruktur. Hal ini menjadi keprihatinan kita semua bahkan menjadi suatu hal yang naif kalau Temanggung yang berada pada dataran tinggi ternyata mengalami musibah banjir.

6. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada sektor ini berdasarkan pengamatan FPPP Pemerintah Daerah sudah berusaha meningkatkannya. Namun program pengembangan kebudayaan terutama terkait produktivitas Kelompok Seni Budaya yang aktif dan produktif masih sangat terbatas. Sehingga perlu sosialisasi, pembinaan dan pendampingan ke masyarakat terutama pemuda sebagai pelaku seni budaya.

Juga untuk pengembangan obyek wisata Pemerintah Daerah perlu mengadakan kajian dan penelitian yang fokus, agar destinasi daya tarik wisata bisa lebih meningkat. Terutama melakukan inovasi-inovasi yang kreatif sehingga sektor wisata bisa bertahan dengan baik.

Rapat Dewan yang kami Hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan semoga ada bermanfaat, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 27 Maret 2023

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA

SEKRETARIS

ROCHMAT FAUZI TH

AHMAD SYARIEF YAHYA